

Rakyat Sri Lanka Menolak Keputusan untuk Mengirim 10 Ribu Pekerja ke Israel

COLOMBO (IM) - Pemerintah Sri Lanka berencana mengirim 10 ribu pekerja ke Israel. Tentu saja mereka menolak dan berkumpul dalam rangka solidaritas dengan Gaza, mereka mengaku malu dan amat marah dengan keputusan pemerintah mereka.

Sejak awal serangan mematikan di kantong Palestina, Israel telah mencabut izin kerja untuk puluhan ribu pekerja Palestina dan berusaha menggantinya dengan pekerja dari Asia Selatan. Pada November, kedutaan Sri Lanka mencapai kesepakatan dengan pemerintah Israel untuk mengizinkan perekrutan segera 10 ribu orang Sri Lanka di pertanian dan lokasi konstruksi.

Kelompok pekerja pertama berangkat ke Israel bulan ini, meningkatkan masalah etika dan keselamatan. "Kita tidak boleh mengeksploitasi situasi ini," kata Presiden cabang Sri Lanka dari World Fellowship of Buddhists, Sudath Dewapura, sebuah kelompok di balik unjuk rasa antaragama dalam solidaritas dengan Palestina.

Sangat membutuhkan dana setelah mengalami krisis ekonomi tahun lalu, Sri Lanka telah berusaha untuk mendapatkan pekerjaan bagi warga negaranya di luar negeri, di mana mereka dapat memperoleh lebih banyak daripada di dalam negeri. Tetapi keputusan untuk mengirim mereka ke zona konflik dan negara yang memaksakan apartheid telah memicu perlawanan dan kritik. "Kami benar-benar menentang 'membawa dolar ke negara ini' (dengan cara tersebut)," kata Dewapura, dilansir dari Arab News, Jumat (29/12).

Shreen Abdul Saroor, seorang aktivis hak asasi terkemuka yang telah memimpin protes solidaritas Gaza, mengatakan bahwa mengirim pekerja ke Israel membantu pembersihan etnis yang berusia seabad dan direncanakan dengan baik di Tel Aviv. Lebih dari 21.100 warga Palestina telah meninggal dan puluhan ribu terluka sejak Israel meluncurkan pemboman Gaza dari udara, darat dan laut. Yang terluka telah berjuang untuk mendapatkan bantuan medis karena serangan udara telah menghancurkan sebagian besar rumah sakit dan klinik di daerah kantong. "Semakin banyak pekerja yang kami kirim untuk menggantikan pekerja Palestina berarti kami membeli kehancuran mereka terhadap negara Palestina," kata Saroor kepada Arab News, menggemakan perlakuan di India di mana serikat pekerja bulan lalu mengatakan bahwa mengirim pekerja ke Israel akan sama dengan keterlibatan dalam perang genosida yang sedang berlangsung melawan Palestina.

Ameen Izzadeen, editor internasional mingguan The Sunday Times yang bergabung dengan protes di Kolombo, mengatakan bahwa Sri Lanka menentang aturan apartheid di Afrika Selatan sampai-sampai setelah beberapa pemain kriketnya melakukan tur ke negara itu pada 1980-an, mereka dilarang bermain game internasional. "Itu adalah komitmen yang dimiliki Sri Lanka, jadi komitmen serupa dijamin sehubungan dengan Israel dan praktiknya yang mengingkari di wilayah Palestina yang diduduki," katanya.

Saat Sri Lanka memimpin Komite Khusus PBB untuk Menyelidiki Praktik Israel yang Mempengaruhi Hak Asasi Manusia Rakyat Palestina dan Orang Arab Lainnya di Wilayah Pendudukan, Izzadeen mengatakan pemerintah tahu apa yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat. • gul

Kebangkitan Industri Senjata Jepang Didorong oleh Perang Ukraina

TOKYO (IM) - Jepang melonggarkan pembatasan ekspor senjata, meskipun secara tidak langsung, untuk membantu Ukraina mendapatkan sistem rudal anti-pesawat Patriot milik Amerika Serikat (AS) yang sangat dibutuhkan. Kabinet Jepang minggu lalu mengizinkan pengiriman sistem senjata yang diproduksi di bawah lisensi AS. Rudal Patriot produksi Jepang itu akan dikirim lebih dulu ke AS, menanggapi permintaan Presiden Joe Biden.

"Ekspor senjata memposisikan Jepang sebagai pemain aktif dalam kebijakan keamanan internasional dan sebagai mitra terpercaya AS," kata ilmuwan politik Jerman Sebastian Maslow, yang mengajar di Universitas Wanita Shirayuri di Sendai, Jepang. Dengan cara ini, Jepang juga berpartisipasi langsung dalam struktur keamanan Eropa. "Oleh karena itu, langkah yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bagian dari kerja sama Jepang yang lebih erat dengan NATO, yang telah dikembangkan sejak tahun lalu," katanya.

Rudal Patriot akan menjadi ekspor pertama sistem senjata mematikan, dan oleh karena itu menandai perubahan mendasar dalam kebijakan pertahanan Jepang. Perdana Menteri Fumio Kishida ingin menggandakan anggaran pertahanan menjadi dua persen dari produk domestik bruto pada tahun 2027. "Peningkatan kekuatan militer ini akan menjadikan Jepang 80 persen negara normal," kata Akihisa Nagashima, politisi pertahanan dari Partai LDP yang saat ini memerintah.

Kelompok hukum yang lebih besar untuk ekspor senjata akan mendukung industri persenjataan Jepang. Sebelumnya, pembatasan itu membuat Jepang absen dari pasar persenjataan global. "Industri pertahanan Jepang masih sulit bersaing secara internasional, meskipun ada kebijakan keamanan yang ambisius sejak Perdana Menteri Abe," kata Sebastian Maslow.

Perubahan itu juga memungkinkan Jepang untuk menjual komponen senjata tidak mematikan, seperti mesin pesawat, dan memasok peralatan pertahanan ke negara-negara yang mempertahankan diri dari invasi yang melanggar hukum internasional, seperti Ukraina. Selain itu, Jepang sedang menajjaki pengembangan jet tempur bersama Inggris dan Italia. Ketiga negara menandatangani perjanjian untuk mengembangkan pesawat tersebut di Tokyo beberapa waktu lalu.

Namun, Partai Komei, mitra koalisi kecil LDP yang didukung pemilih beragama Buddha, masih memblokir proyek itu. Penolakan terkait rencana penjualan jet tempur tersebut ke negara lain. LDP sekarang ingin meningkatkan kesepakatan dengan Partai Komei mengenai pelanggaran lebih lanjut aturan ekspor senjata sampai akhir Februari tahun depan. • tom



PM SPANYOL PEDRO SANCHEZ KUNJUNGAN KE IRAK

PM Irak Mohammed Shia' al-Sudani (kanan) dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menghadiri konferensi pers bersama di Bagdad, Irak, Kamis (28/12). Pedro Sanchez melakukan kunjungan resmi ke Irak untuk membahas hubungan bilateral dan beberapa masalah regional.

WHO: Resolusi DK PBB Soal Pengiriman Bantuan ke Gaza tak Berikan Dampak

Tugas yang diemban tim WHO di Gaza kian sukar.

JENEWA (IM) - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyoroti kian merosotnya kondisi sistem kesehatan di Jalur Gaza.

Dia pun mengkritisi tak adanya efek dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan agar bantuan kemanusiaan dapat segera dialirkan ke wilayah tersebut.

Ghebreyesus mengungkapkan, resolusi Dewan Keamanan PBB tentang pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang diadopsi pekan lalu, telah membuka harapan bahwa paket bantuan akan segera masuk ke Gaza.

"Namun, berdasarkan laporan saksi mata WHO di lapangan, tragisnya resolusi tersebut belum memberikan dampak," ujarnya, dikutip laman Middle East Monitor,

Jumat (29/12). Dia menambahkan, tugas yang diemban tim WHO di Gaza pun kian sukar.

"Kemampuan WHO untuk memasok obat-obatan, pasokan medis, dan bahan bakar ke rumah sakit-rumah sakit semakin terhambat oleh kelaparan serta keputusan orang-orang dalam perjalanan menuju, dan di dalam, rumah sakit yang kita capai," kata Ghebreyesus.

Menurut WHO, saat ini sistem layanan kesehatan di Gaza sudah sangat kritis. Terdapat 21 rumah sakit di sana yang sudah tak beroperasi. Sebanyak 13 rumah sakit berfungsi sebagian. Sementara itu, dua rumah sakit lainnya hanya berfungsi minim.

"Apa yang sangat kita perlukan saat ini adalah gencatan senjata untuk menyelamatkan warga sipil dari kekerasan

lebih lanjut dan memulai jalan panjang menuju rekonstruksi dan perdamaian," ungkap Ghebreyesus.

Menurut WHO, saat ini sistem layanan kesehatan di Gaza sudah sangat kritis. Terdapat 21 rumah sakit di sana yang sudah tak beroperasi. Sebanyak 13 rumah sakit berfungsi sebagian. Sementara itu, dua rumah sakit lainnya hanya berfungsi minim.

"Apa yang sangat kita perlukan saat ini adalah gencatan senjata untuk menyelamatkan warga sipil dari kekerasan yang sudah tak beroperasi. Selain itu, dia menilai resolusi tersebut pun masih jauh dari apa yang diharapkan, yakni gencatan senjata total.

"Resolusi 2272 yang diadopsi kemarin, Jumat (22 Desember 2023), merupakan upaya untuk mencegah kelaparan di Jalur Gaza dan menyelamatkan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, dari situasi bencana. Namun resolusi itu tidak cukup untuk menghentikan mesin perang Israel, apalagi resolusi tidak mencakup gencatan senjata," kata Aboul Gheit dalam sebuah pernyataan, dikutip laman kantor berita Palestina, Wafa, Sabtu (23/12) lalu.

Dia mengungkapkan Resolusi 2272 diadopsi setelah adanya beberapa kali penundaan

atas permintaan Israel. Aboul Gheit menekankan, yang dibutuhkan penduduk Gaza bukan hanya bantuan kemanusiaan, tapi juga perlindungan dari gempuran dan pemboman terus menerus oleh Israel.

"Setiap langkah untuk meringankan penderitaan warga sipil di Gaza berada pada arah yang benar, namun mengatasi bencana kemanusiaan tidak dapat dicapai melalui tindakan parsial atau paliatif untuk meredakan kemarahan opini publik dunia atas apa yang terjadi di Gaza," ucap Aboul Gheit.

Aboul Gheit menegaskan, menolak gencatan senjata segera sama saja dengan mengizinkan pembunuhan terus berlangsung di Gaza. Hingga berita ini ditulis, jumlah warga Gaza yang terbunuh akibat agresi Israel telah mencapai sedikitnya 21.300 jiwa. Sementara korban luka melampaui 52 ribu orang. Jumlah itu dihitung sejak Israel memulai agresinya ke Gaza pada 7 Oktober 2023. • tom

Tiongkok Larang Warganya Masuki Myanmar Bagian Utara

BEIJING (IM) - Tiongkok melarang warganya datang ke Myanmar bagian utara karena buruknya kondisi keamanan di daerah itu, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning.

"Situasi keamanan saat ini di Kokang, yang merupakan zona mandiri, sangat parah dan kompleks. Kami mengingatkan warga negara Tiongkok untuk tidak melakukan perjalanan ke Myanmar bagian utara," kata Mao kepada media di Beijing, pada Kamis (28/12).

Konflik bersenjata terjadi sejak 27 Oktober 2023 ketika aliansi kelompok etnis bersenjata "Aliansi Tiga Persaudaraan" secara terkoordinasi menyerang pos-pos militer di negara bagian Shan di Myanmar utara yang berbatasan dengan Tiongkok.

"Kami juga meminta warga negara Tiongkok yang sudah ada di daerah tersebut, terutama yang ada di kota Laukkang, untuk pindah ke tempat yang aman atau kembali ke Tiongkok sesegera mungkin dan mengambil tindakan pencegahan demi

keselamatan," kata Mao. Tiga kelompok itu adalah Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), dan Tentara Arakan (AA). Ketiganya sudah bertemu di China pertengahan Desember 2023 untuk membuat kesepakatan perdamaian di Myanmar. "Kami tetap mempercayai bahwa gencatan senjata perlu dipertahankan dan pembicaraan damai oleh pihak-pihak yang relevan di Myanmar perlu dilakukan sehingga dapat mendorong perdamaian di daerah perbatasan Tiongkok-Myanmar," tambah Mao.

Tiongkok berharap semua pihak berkepentingan menahan diri, aktif meredakan situasi di lapangan, dan mementingkan pendekatan damai di Myanmar utara. "Dan mengambil tindakan konkret untuk melindungi keselamatan dan keamanan proyek dan personel Tiongkok di Myanmar," kata Mao.

Serangan aliansi pada 27 Oktober 2023 membuat junta kehilangan lebih dari 100 pos

keamanan dan empat kota, termasuk perbatasan penting dengan Tiongkok. Junta mengaku kehilangan kendali atas beberapa kota di perbatasan, termasuk Chinshwehwar yang terletak di sebelah Provinsi Yunnan, Tiongkok. Tiongkok sendiri direpotkan oleh arus pengungsian dan pelanggaran lintas batas akibat eskalasi konflik di Myanmar.

PBB menyebutkan, 18,6 juta penduduk Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan dan sekitar 6 juta di antaranya membutuhkan bantuan karena harus mengungsi, layanan kesehatan dan pendidikan yang terganggu, kerawanan pangan dan malnutrisi serta risiko perlindungan. Pada 2017, militer Myanmar meluncurkan operasi kekerasan terhadap warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine yang disebut kelompok-kelompok HAM sebagai genosida. Hampir 1,2 juta warga Rohingya terpaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh untuk tinggal di kamp-kamp pengungsi penuh sesak selama bertahun-tahun. • ans

Lebih dari 8.600 Anak Palestina Tewas Akibat Perang di Gaza

GAZA CITY (IM) - Ribuan anak Palestina tewas akibat rentetan serangan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu saat perang melawan Hamas mulai berkecamuk. Ribuan anak lainnya dilaporkan hilang dan diduga tertimbun reruntuhan bangunan yang hancur akibat pemboman tanpa henti di daerah kantong Palestina tersebut.

Seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (29/12), kantor media otoritas Gaza yang dikuasai Hamas melaporkan bahwa lebih dari 8.663 anak Palestina di Jalur Gaza tewas dibunuh oleh pasukan Israel selama perang berkecamuk beberapa bulan terakhir.

Laporan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 21.320 orang tewas akibat rentetan serangan Israel sejak awal Oktober lalu. Sekitar 55.603 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan tersebut.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf al-Qudra, seperti dilansir AFP, menyebut sedikitnya 210 orang tewas di Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir.

Kementerian Kesehatan Gaza dalam pernyataannya juga menyampaikan kekhawatiran atas penyebaran penyakit di kalangan anak-anak dan kurangnya air bersih, makanan juga obat-obatan.

"Kondisi kemanusiaan dan kesehatan para pengungsi telah mencapai level bencana," sebut Kementerian Kesehatan Gaza.

Sebagian besar korban tewas di Jalur Gaza disebut sebagai warga sipil. Pasukan Israel dilaporkan berulang kali menargetkan sekolah,

sekolah, dan bahkan pusat perawatan bayi yang baru lahir, dalam serangannya yang menewaskan bayi-bayi yang baru lahir.

Data yang dirilis oleh Save the Children, organisasi kemanusiaan terkemuka untuk anak-anak, pada awal November lalu menyebut bahwa satu anak tewas setiap 10 menit di Jalur Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebut Jalur Gaza sebagai "kuburan" bagi anak-anak karena banyaknya korban jiwa.

"Kekhawatiran terbesar kami soal laporan jumlah anak-anak yang terbunuh mencapai puluhan, kemudian ratusan, dan akhirnya ribuan, menjadi nyata hanya dalam waktu dua minggu," ucap juru bicara UNICEF, badan anak PBB, James Elder, dalam pernyataan pada 31 Oktober lalu.

"Gaza telah menjadi kuburan bagi ribuan anak. Ini bagaimana hidup di negara untuk semua orang," sebutnya.

Sebuah LSM bernama Defence for Children International-Palestina mengatakan pada awal bulan lalu bahwa pasukan Israel telah membunuh dua kali lebih banyak anak-anak Palestina di Jalur Gaza pada bulan Oktober, dibandingkan jumlah total anak-anak Palestina yang tewas di Tepi Barat dan Jalur Gaza jika digabungkan sejak tahun 1967 silam.

Disebutkan juga bahwa selama hampir dua tahun perang antara Rusia dan Ukraina berlangsung, sedikitnya 510 anak-anak tewas, yang berarti kurang dari satu anak per hari. • tom



LATIHAN KONSER TRADISIONAL TAHUN BARU DI WINA  
Konduktor Christian Thielemann (kanan, belakang) memimpin latihan konser tradisional yang akan tampil pada malam Tahun Baru di Wina, Austria, Kamis (28/12).